

Kunjungan Wisatawan di Bogor Mulai Naik

CIBINONG (IM)- Pandemi Covid-19 sempat membuat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bogor ngedrop atau terjun bebas. Namun seiring pelonggaran berbagai aktivitas, tingkat kunjungan wisatawan perlahan mulai bangkit kembali.

Bupati Bogor, Ade Yasin menjelaskan, sebelum pandemi pada 2019, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bogor mencapai 9,7 juta pengunjung. Namun pada 2020, efek pandemi mulai berasa. Angka kunjungan wisatawan merosot hingga nyaris 50% atau menjadi 5.117.889 kunjungan.

Jumlah tersebut terdiri dari 60.552 wisatawan mancanegara dan 5.057.335 wisatawan domestik. Di 2021, angka kunjungan wisatawan mulai perlahan naik meski belum signifikan. Tercatat ada kenaikan menjadi 6.455.954 kunjungan wisatawan. Terdiri dari 2.609 wisatawan mancanegara dan 6.453.345 wisatawan domestik.

Ade Yasin juga mengungkapkan bahwa sektor pariwisata memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). "Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Bogor cukup signifikan, yakni sebesar Rp 282 miliar atau 7,61% dari total PAD tahun 2021 yaitu Rp 3,7 triliun," ujar

Ade Yasin saat webinar nasional bersama Universitas Djuanda (Unida) Bogor bertajuk "Save Puncak", Rabu (23/3).

Menurut Ade Yasin, pihaknya telah melakukan berbagai cara untuk memulihkan sektor pariwisata. Salah satunya dengan upaya menjadikan kawasan Puncak sebagai kawasan wisata yang ramah, aman, nyaman dan berkelanjutan. Wilayah Puncak sendiri memang masih menjadi favorit wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bogor.

"Semoga bisa terwujud dengan baik," tandasnya.

Menurut Ade Yasin, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Bogor, dengan perencanaan pengembangan yang tepat, sektor pariwisata ini diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja, mendorong pendapatan daerah dan menggerakkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bogor.

"Terlebih Kabupaten Bogor ini daerah yang berdekatan dengan ibu kota negara dan berbatasan langsung dengan 10 kabupaten/kota dan dua provinsi yang dikelilingi sekitar 70 juta populasi, sehingga potensi wisata Puncak ini sangat besar, bahkan kawasan Puncak menjadi wisata favorit warga Jabodetabek," katanya. ● **gio**

Ade Yasin Sampaikan LKPJ ke DPRD Kabupaten Bogor

CIBINONG (IM)- Bupati Bogor, Ade Yasin, didampingi Wakil Bupati, Iwan Setiawan melakukan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bogor Tahun Anggaran 2021, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Rabu (23/2).

Bupati Bogor, Ade Yasin menjelaskan, LKPJ Bupati Bogor Tahun Anggaran 2021 adalah laporan tahun ketiga dalam periode RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2018 - 2023, yang disusun berdasarkan sistematisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

"Untuk mendukung pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan, kami keluaran beberapa kebijakan strategis, baik berupa Peraturan Kepala Daerah, keputusan atau tindakan Kepala Daerah dalam satu tahun anggaran. Sedikitnya, ada 56 produk hukum yang diinisiasi oleh perangkat daerah berhasil disusun pada tahun 2021," kata Ade Yasin.

Menurut Ade Yasin, Pemkab Bogor telah melakukan beberapa upaya peningkatan antara lain, kebijakan pengurangan pokok pajak dan sanksi administratif pada periode pembayaran tertentu, kebijakan perluasan kanal digital pembayaran pajak dan retribusi daerah. Selanjutnya kebijakan integrasi sistem

perputaran data dengan perangkat daerah pengelolaan perizinan dalam rangka optimalisasi potensi pajak asli daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 tahun 2021.

Sementara untuk kebijakan belanja daerah tahun 2021 kami lakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan pada awal tahun 2021, yaitu efisiensi kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, terutama pada pos belanja barang dan jasa. Pengembangan inovasi yang mendukung terciptanya efektivitas dan efisiensi kerja perangkat daerah, peningkatan komponen belanja yang mendorong pemulihan ekonomi daerah dan reformasi sosial, peningkatan belanja yang diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan penciptaan lapangan kerja padat karya.

Ia juga berharap rekomendasi yang akan diberikan oleh DPRD Kabupaten Bogor atas LKPJ tahun anggaran 2021, semoga dapat memacu semangat seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor untuk lebih meningkatkan kinerjanya demi tercapainya cita-cita Pancasila yaitu Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Maju, Bogor Membangun dan Bogor Berkeadilan.

Turut hadir di Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor ini Pimpinan dan Anggota DPRD, Dandim 0621, Kapolres Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, perwakilan Lanud ATIS, dan para Kepala Perangkat Daerah. ● **gio**



IDN/ANTARA

RITUAL BLANGIRAN JELANG RAMADAN

Muda-mudi melakukan ritual Blangiran di Bandar Lampung, Lampung, Kamis (24/3). Ritual Blangiran atau mandi bersama untuk bersuci dilakukan masyarakat Lampung menjelang memasuki bulan Ramadan untuk kesucian dan keberkahan dalam melaksanakan ibadah puasa.

Ketua PWI Jabar Minta PWI Kota/Kab. Se-Jabar Siap Hadapi Persaingan

SOREANG (IM)- Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat, Hilman Hidayat, meminta PWI Kota/Kabupaten semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas. Hal ini dimaksudkan agar PWI sebagai organisasi tertua terbesar tidak berpuas diri dalam capaian kinerja selama ini.

Hal ini dikemukakan Hilman Hidayat dalam Konferensi Kerja tahun 2022 dan puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Hotel Grand Sunshine, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (24/3). Konferensi Kerja PWI Jabar insisecara resmi dibuka oleh Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari.

Menurut Hilman, tantangan ke depan, persaingan organisasi sejenis akan semakin ketat dan kompetitif dalam menghadapi era digital sekarang ini. Karena itu, Hilman mengajak semua anggota PWI Jabar untuk mengasah dan mengikuti mendalami era digital secara cepat saat ini.

Sementara itu, dalam penyampaian saat sambutan pembukaan Konferensi, Atal S Depari menyebutkan jika PWI Jabar selalu menghadirkan momen istimewa dalam setiap kegiatan, khususnya saat ini soal Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

"Tahun ini PWI Jabar akan mengadakan UKW untuk 1.000 anggotanya secara gratis yang disupport oleh kepala Daerah yaitu Gubernur Jabar, Ridwan Kamil. Ini merupakan momen luar biasa dan baru terjadi," ungkap Atal S Depari, yang disambut tepuk tangan seluruh peserta Konferensi.

"Untuk itu para jurnalis yang tergabung di PWI Jabar mari gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, agar anda semua jadi wartawan kompeten," ajaknya.

Hal senada disampaikan Ketua PWI Jabar Hilman Hidayat, dirinya menegaskan kualitas adalah kunci peningkatan daya tawar bagi wartawan di era Keterbukaan Informasi.

"Saat ini persaingan dengan organisasi lain sangat terasa. Kuncinya peningkatan kualitas wartawan sebagai daya tawar kepada mitra kita, yaitu melalui UKW," kata Hilman Hidayat.

Oleh karena itu, kata Hilman, upaya untuk meningkatkan kualitas wartawan, PWI Jabar tahun ini akan melaksanakan UKW secara marathon dengan target 1.000 peserta. "UKW ini gratis bagi anggota PWI seluruh kabupaten dan kota se Jabar," ungkapnya. ● **gio**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

PERESMIAN STASIUN GARUT

Menteri BUMN Erick Thohir (ketiga kiri) bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (ketiga kanan) dan Dirut PT. KAI Didiek Hartantyo (kedua kiri) berfoto bersama usai meresmikan Stasiun Garut di Garut, Jawa Barat, Kamis (24/3). Peresmian Stasiun Garut tersebut untuk memaksimalkan reaktivasi jalur Kereta Api Garut-Cibatu dan menyokong konektivitas moda kereta api dalam melayani masyarakat serta diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

3 Hari Sebelum Ramadan, Seluruh THM di Kota Bogor Wajib Ditutup

Kalau kedatangan tertangkap tangan, mereka (THM) buka pada hari itu, apalagi di bulan suci Ramadan, kami akan berikan sanksi bahkan penyegelan karena melanggar aturan yang ada, kata Kepala Satpol PP Kota Bogor, Agustian Syach.

BOGOR (IM)- Satpol PP Kota Bogor mewajibkan semua taman hiburan malam (THM) harus sudah menutup usahanya tiga hari sebelum bulan suci Ramadan.

Kepala Satpol PP Kota Bogor, Agustian Syach menegaskan jika masih ada THM yang buka saat Ramadan, sanksi sampai ke tahap penyegelan," ungkap Agustian Syach kepada wartawan, Kamis (24/3).

"Ya, jadi kalau kedatangan tertangkap tangan, mereka (THM) buka pada hari itu,

yang berada di Kota Bogor dipastikan sudah harus tutup. Ditambahkannya, bahwa jika tertangkap tangan, ada THM beroperasi pada bulan suci Ramadan, pihaknya akan memberikan sanksi sampai ke tahap penyegelan," ungkap Agustian Syach kepada wartawan, Kamis (24/3).

"Ya, jadi kalau kedatangan tertangkap tangan, mereka (THM) buka pada hari itu,

apalagi di bulan suci Ramadan kami akan berikan sanksi bahkan penyegelan karena melanggar aturan yang ada," tambahny.

Agus memaparkan, jika ada THM yang bandel atau mengelabui petugas pasti akan ketahuan juga, karena pihaknya akan rutin melaksanakan patroli.

"Ya kalau nekat harus berani terima konsekuensi. Bahwa setiap memasuki bulan suci Ramadan ada peraturan di perwali terutama yang mengatur operasional THM. Kami lihat dan pastikan juga, kalau setiap bulan ramadan itu rata-rata mereka taat kepada peraturan," paparnya.

Agus menambahkan, terkait sosialisasi menjelang bulan suci Ramadan, maka akan ada surat edaran terlebih dahulu oleh dari Badan Kes-

atuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bogor. Untuk terkait sosialisasi untuk bulan suci ramadan, itu biasanya ada dari Badan Kesbangpol yang memberikan surat edaran.

"Kami dari Satpol PP bagiannya adalah di penindakan. THM di Kota Bogor ada 34 THM mulai dari Tanah Sareal sampai ke Bogor Selatan. Kami tidak mungkin ngawasin 34 titik itu dari mulai Tanah Sareal sampai ke Selatan dengan satu tim. Tetapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memantau semuanya dengan teknik kami," tuturnya.

Terpisah, Sekretaris GP Ansor Kota Bogor, Fahmi Ihsani berharap, kepada pengusaha serta pengelola THM yang ada di Kota Bogor agar bisa mentaati aturan main yang ada. Dengan mentaati aturan,

maka itu sudah menghormati umat muslim yang tengah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan.

"Kami juga akan membantu Pemkot Bogor untuk melakukan pengawasan meski dilakukan secara mandiri. Jika, ada temuan di lapangan seperti ada THM yang membandel buka, maka GP Ansor akan memberi informasi kepada instansi terkait agar bisa segera melakukan penindakan," terangnya.

"GP Ansor ingin kesucian bulan ramadan tidak ternoda dengan hal-hal yang negatif. Umat muslim sangat mengharapkan bisa ibadah dengan khusyuk dan tenang tidak seperti saat masa PPKM dua tahun kebelakang, yang semuanya dilakukan serba terbatas karena aturan PPKM," pungkasnya. ● **gio**

35 SMK Negeri di Jabar Resmi Jadi BLUD

BANDUNG (IM)- Sebanyak 35 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Jawa Barat (Jabar) resmi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diharapkan meningkatkan mutu pendidikan siswa memasuki dunia kerja.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Jawa Barat mengumumkan peresmian BLUD 35 SMK tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat kepada 35 kepala sekolah di SMK Negeri 1 Karawang.

"Jadi tugas dan fungsi SMK untuk menciptakan generasi bangsa masa depan yang kompeten, unggul dan berdaya saing tinggi serta produktif. Sehingga lulusan SMK lebih siap kerja dan akan menyelesaikan tingkat pengangguran terbuka SMK yang selama ini sebagai penyumbang tertinggi," kata Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dedi Supandi dalam keterangan persnya, Kamis (24/3).

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat, jumlah BLUD Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia hingga Maret 2022 mencapai 112 sekolah.

Dari data tersebut, Jawa

Barat menjadi provinsi terbanyak yang menerapkan tata kelola BLUD dengan jumlah 35 SMK.

Sebanyak 112 SMK tersebut berasal dari Provinsi Jawa Timur sebanyak 20 SMK, DKI Jakarta sebanyak 10 sekolah, Jogja 3 sekolah, Sulawesi Selatan sebanyak 19 sekolah, Sumatera Barat sebanyak 25 sekolah, dan Jawa Barat sebanyak 35 sekolah.

Dedi mengatakan dengan menjadi BLUD, hasil produksi/jasa yang didapat SMK tidak harus disetor ke kas daerah dan dapat langsung dikelola pihak sekolah.

Hal ini, kata dia, membuat pelayanan di SMK Negeri menjadi efektif dan efisien karena pihak sekolah diberi kebebasan untuk berinovasi dan penerapan BLUD di SMK negeri adalah adanya teaching factory yang sudah diterapkan.

Teaching factory merupakan metode pembelajaran praktik dengan alat praktik yang sama dengan industri dan hal ini memungkinkan SMK dan siswa memproduksi barang dan jasa yang sama dengan industri.

Pada akhir tahun 2021 lalu, Kemendikbud memberikan penghargaan kepada 60 SMK di Indonesia dengan predikat

teaching factory terbaik dan dari 60 SMK tersebut lalu sebanyak 9 SMK terdapat di Jawa Barat.

Data tersebut menandakan jika teaching factory yang dimiliki SMK di Jawa Barat sudah banyak yang berstandar industri. Sebab, salah satu syarat SMK menjadi BLUD adalah fasilitas teaching factory-nya harus berstandar pabrik.

Hasil produksi para siswa di 35 SMK BLUD di Jabar, dipajang dalam pameran di SMKN 1 Karawang.

Adapundaftar 35 BLUD SMKN di Jabar antara lain SMKN 1 Cibinong Kabupaten Bogor, SMKN 3 Kota Bogor, SMKN 1 Kota Depok, SMKN 1 Kota Bekasi, SMKN 1 Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, SMKN 1 Majalengka, SMKN 1 Losarang Kabupaten Indramayu, SMKN 1 Kota Cirebon, SMKN 1 Mundu Cirebon, SMKN 1 Kuningan.

Kemudian SMKN 3 Kuningan, SMKN 1 Karawang, SMKN 1 Purwakarta, SMKN 2 Subang, SMKN 1 Kota Sukabumi, SMKN 1 Cibadak Kabupaten Sukabumi, SMKN 1 Pacet Kabupaten Cianjur, SMKN 2 Kota Tasikmalaya, SMKN 2 Kota Tasikmalaya, SMKN Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya. ● **pra**



IDN/ANTARA

DELEGASI FORUM EDM-CSWG G20 KUNJUNGI BOROBUDUR

Delegasi pertemuan EDM-CSWG G20 memotret stupa Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (24/3). Kunjungan wisata peserta forum EDM-CSWG G20 Indonesia 2022 tersebut untuk memperkenalkan destinasi wisata di Indonesia.

Jabar Siapkan 1 Juta Liter Migor, tapi Hanya Bisa Dipesan Online

BANDUNG (IM)- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sedang menyiapkan 1 juta liter minyak goreng untuk mengantisipasi kelangkaan saat ini. Namun, pembelian minyak goreng itu hanya bisa dilakukan lewat aplikasi.

Adapun aplikasinya sedang disiapkan oleh tim Jabar Digital Service. Jika tak ada kendala, aplikasi tersebut akan diluncurkan pekan depan. "Ini dalam rangka menolong masyarakat walaupun bukan kewenangannya dalam urusan minyak goreng tapi kami terus cari cara memudahkan urusannya. Jadi kita akan launching aplikasi pemesanan minyak goreng, aplikasinya dibikin oleh Jabar Digital Service," kata Emil, sapaan akrabnya, usai operasi pasar minyak goreng murah di Institut Pertanian Bogor (IPB), Kamis (24/3). "Disesuaikan dengan ketersediaan stok, tapi 1 juta liter kita akan siapkan di tahap satu," tambahny.

Adapun teknis pemesanan minyak goreng di aplikasi tidak bisa oleh pribadi melainkan dikordinasi oleh RW dengan prioritas wilayah yang harganya minyak gorengnya masih tinggi. Artinya, minyak tersebut lebih diprioritaskan untuk warga

kurang mampu.

Selain untuk meredam lonjakan permintaan, ketua RW lebih mengetahui siapa saja warga yang paling membutuhkan minyak goreng. "Nanti dikontrol oleh RW, tidak boleh pribadi karena RW yang tahu warga mana yang membutuhkan sehingga yang menengah atas ambil yang premium yang menengah bawah yang kita lindungi," kata Emil.

Setelah dipesan oleh RW, minyak goreng curah akan langsung didistribusikan. Harga yang ditetapkan pun adalah harga normal. Menurut Emil, cara tersebut sebagai bentuk bahwa negara hadir selain untuk memotong mata rantai yang membuat harga minyak goreng mahal. "Ini adalah cara negara hadir untuk memotong mata rantai yang membuat harga minyak goreng mahal," ungkapnya.

Ia menambahkan, pemesanan melalui aplikasi ini hanya berlaku di saat krisis. "Sistem ini hanya di saat krisis ya karena negara tidak berurusan dengan rakyatnya secara permanen. Jadi pemesanan di aplikasi ini akan berhenti kalau kondisi sudah normal," jelasnya. ● **pur**

HIPMI Fasilitasi Pelaku UMKM ke Tempat Pengalangan Produk Makanan

BOGOR (IM)- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) memfasilitasi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), untuk berkenalan dengan pabrik pengemasan teknologi pengalangan di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Hal ini dilakukan lantaran para pelaku UMKM kerap mengeluhkan daya ketahanan produk UMKM yang belum bisa bertahan lama.

Pengurus BPP HIPMI Bidang Pemasaran dan Pelatihan UMKM, Charlie Angel, mengatakan produk UMKM tidak hanya sebatas pada permodalan dan pemasaran. Sehingga para pelaku UMKM pun diajak oleh HIPMI ke pabrik Okwi Food di Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

"Kami dari HIPMI siap membantu memfasilitasi dan memberi perantara bagi para UMKM se-Indonesia bekerjasama dengan Okwi Food, agar bagaimana kita bisa sama-sama berkembang dalam teknologi pengemasan," kata Charlie, Kamis (24/3).

Ia menjelaskan, dari pengalaman para pelaku UMKM, selain masalah permodalan, ada banyak yang terkendala pada pemasaran. Selama ini jangka waktu penyimpanan untuk sebuah

produk UMKM paling singkat selama satu hingga dua pekan. Sedangkan paling lama berada di waktu satu hingga tiga bulan.

Oleh karena itu, HIPMI ingin bersama-sama memajukan UMKM agar memahami ketahanan produk. Sehingga bisa lebih baik dengan teknologi pengalangan ini. Tidak hanya sekedar membantu di permodalan dan pemasaran saja.

Charlie pun mengaku tertarik untuk mengajak para pelaku UMKM bersama-sama maju dan berkembang. Baik pada ranah pemasaran, permodalan, maupun pengemasan yang sedang dipelajari bersama-sama. "Mudah-mudahan produk UMKM Indonesia bisa lebih banyak yang go internasional dan diterima masyarakat seluruh dunia," harapnya.

Dia juga menjelaskan, jika ada UMKM yang terkendala permodalan misalnya, sudah ada pemesanan 1.000 kaleng namun modalnya kurang, Charlie mengatakan HIPMI akan siap mendukung. "Dari HIPMI akan membantu, bisa juga dari branding, kemasan dan terkenal modal, sampaikan saja ke kami. Kami akan memantau teman-teman UMKM yang sudah berhasil kalau hingga ekspor," kata Charlie. ● **gio**